

## THE INFLUENCE OF GOVERNMENT IDEOLOGY ON TURKISH MUSLIM DRESSING

Firstiyana Romadlon Ash Shidiqiyah<sup>1,3</sup>  
Siti Arafah<sup>2,3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

<sup>2</sup>Erciyes University, Kayseri, Turkey

<sup>3</sup>E-mail: firstyromadlon@gmail.com, sarafah297@gmail.com

### Abstract

This study aims to explain how government ideology has influenced the Turkish Muslim dress, particularly during the reign of Mustafa Kemal Pasha and Recep Tayyip Erdogan. This study used a historical method, which includes collecting and searching for sources and then processing the data to find facts. There were four stages in carrying out the historical approach, namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography, while data collection is used literature review. The results indicated that the way Turkish Muslims dress has been influenced by government ideology. Meanwhile, during the time of Mustafa Kemal, who upheld the secularist ideology, Turkish people were forbidden from wearing head coverings, veils, Muslim clothing, and fez. Even the Turkish people were ordered to dress in a Western style, while during the time of Tayyip Erdogan, where he tried to transform Turkish secularism into a more moderate one, lifted some of the prohibitions during the Kemal era by allowing the Turkish people to wear headscarves, veils, fez and Muslim clothing.

**Keywords:** Influence, Ideology, the Way of Dressing, Turkish Muslim Society

### الملخص

يهدف هذا البحث إلى وصف تأثير أيديولوجية الحكومة على طريقة ارتداء ملابس المجتمع الإسلامي التركي، وخاصة أيديولوجية الحكومة في عهد مصطفى كمال باشا ورجب طيب أردوغان، استخدم هذا البحث المنهج التاريخي، حيث يتضمن المنهج التاريخي بشكل عام عملية جمع المصادر والبحث عنها ثم معالجة البيانات للعثور على الحقائق. هناك أربع مراحل في تنفيذ المنهج التاريخي، وهي الاستدلال والنقد والتفسير والتأريخ، بينما تستخدم الباحثة في جمع البيانات البحث المكتبي. تشير نتائج هذا البحث إلى أن أيديولوجية الحكومة تؤثر على طريقة ارتداء ملابس المجتمع الإسلامي التركي. في عهد مصطفى كمال، الذي كان متمسكًا بأيديولوجية العلمانية فرضت قيود على الشعب التركي في ارتداء الحجاب والنقاب والملابس الإسلامية والطربوش، حتى يُطلب من الشعب التركي ارتداء الملابس الغربية، بينما في عهد طيب أردوغان، تم تحويل العلمانية التركية إلى علمانية أكثر اعتدالاً، ورفع بعض المحظورات في عهد مصطفى كمال من خلال السماح للشعب التركي بارتداء الحجاب والنقاب والطربوش والملابس الإسلامية

**الكلمات المفتاحية:** تأثير أيديولوجية الحكومة، طريقة ارتداء ملابس، المجتمع الإسلامي التركي

## PENDAHULUAN

Turki merupakan wilayah di kawasan Eurasia yang berada di persimpangan dua benua, yaitu Asia dan Eropa sehingga kontak budaya baik dengan Barat maupun Timur tidak dapat dihindari. Letak wilayah negara Turki berada di sebelah tenggara Eropa yaitu di daerah Balkan sampai dengan barat daya Asia yaitu di Semenanjung Anatolia. Turki merupakan sebuah negara yang didirikan pada tahun 1923 oleh Mustafa Kemal setelah berhasil mengalahkan kekaisaran Ottoman. Mustafa Kemal kemudian membuat kebijakan dengan mengubah sistem kekhalifahan Turki dengan sistem republik dan ia berhasil menjabat sebagai presiden pertama melalui pemilu pada tanggal 29 November 1923 (Nuzulian, 2008, hlm. 48). Turki menjadi negara ke-19 dengan populasi terbanyak yaitu 83,047,706 (2022) yang terdiri dari beberapa kelompok etnis yaitu etnis Turki 70-75%, etnis Kurdi 19% dan etnis minoritas lainnya (7-12%) (data 2016). Adapun masyarakat Turki mayoritas beragama Islam dengan persentase 99.8% dan sisanya 0,2% beragama lain seperti agama Kristen dan Yahudi (“Turkey,” 2022). Adapun muslim di Turki sendiri terdiri dari beberapa kelompok seperti Islam Suni sebagai kelompok mayoritas (70-80%), Syiah, Alawiah, dan lain-lain.

Pergantian dari sistem pemerintahan kekhalifahan Turki Utsmani menjadi Republik Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal membawa banyak perubahan, salah satunya ideologi negara yang awalnya bercorak Islami menjadi negara yang sekuler. Ideologi suatu pemerintahan sendiri merupakan sebuah kumpulan ide dan keyakinan yang menerangkan bagaimana baiknya masyarakat bekerja. Ideologi politik biasanya mengenai dirinya dengan bagaimana mengatur kekuasaan dan bagaimana seharusnya dilaksanakan. Ideologi politik berisi nilai-nilai dan ide-ide membingkai cara berpikir dan perilaku politik seseorang yang kemudian digunakan untuk menggerakkan kegiatan dan aksi (Macridis, 1983, hlm. 4). Adapun

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ideologi merupakan macam ide dasar yang digunakan untuk memberikan pedoman dan tujuan untuk ketahanan hidup, sedangkan ideologi politik adalah kerangka keyakinan yang menjelaskan dan melegitimasi permintaan politik saat ini atau yang dicari dan memberikan sistem sebagai metodologi, rencana, pedoman, dan juga proyek untuk mencapainya.

Mustafa Kemal banyak berkiblat pada Barat dan meninggalkan identitas keagamaan untuk mencapai Turki yang modern. Republik Turki yang sekuler berhasil dibangun oleh Mustafa Kemal bahkan terus berlanjut pada beberapa presiden setelahnya dan terus mendarah daging pada masyarakat Turki. Adapun dengan munculnya Erdogan sebagai Presiden Turki pada 2014 hingga sekarang (2022) membawa revolusi baru, ia melakukan kebijakan-kebijakan yang cenderung berbeda atau bahkan berlawanan dengan Mustafa Kemal. Erdogan ingin membawa Turki kembali untuk mendekat pada budaya Islam dan membawa Turki pada sekuler yang lebih moderat.

Perbedaan ideologi pemerintahan yang menonjol dari masa kekhalifahan Turki Utsmani, Mustafa Kemal dan Erdogan membawa banyak pengaruh pada masyarakat Turki, baik dari segi agama, politik, budaya, sosial dan lain-lain. Karena setiap pemerintahan memiliki karakteristik dan ambisi tersendiri yang akan menuntut masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan tersebut. Perubahan ideologi pemerintahan dapat berpengaruh pada budaya masyarakat sekitar, salah satunya yaitu pada cara berpakaian. Perlu diketahui jika suatu pakaian (dan bukan *fashion*) bisa menjadi sebuah sistem-tanda yang dapat menggambarkan suatu nilai seperti nilai kultural, politik, sosial, dan bahkan religi di suatu tempat dan suatu masa (Maftuhin, 2011, hlm. 162).

Sebuah pakaian atau cara berpakaian dapat menggambarkan keadaan politik pada suatu wilayah dan masa. Hal ini selaras dengan suatu kekuasaan politik yang dapat memengaruhi pakaian atau cara berpakaian suatu masyarakat. Contoh

kekuasaan politik yang memengaruhi cara berpakaian masyarakat seperti di bawah Republik Romawi, the Lex Oppia, pada tahun 215 SM yang memutuskan bahwa wanita tidak boleh memakai lebih dari setengah ons emas. Kaisar Tiberius yang memutuskan bahwa laki-laki tidak boleh memakai pakaian sutra, kain lembut seperti sutra dianggap hanya cocok untuk wanita. Adapun di Rusia undang-undang tentang pakaian digunakan untuk memodernisasi negara oleh Tsar Peter I setelah ia kembali dari Amsterdam dan London pada tahun 1697–1698. Pada tahun 1701 ia memutuskan bahwa rakyatnya harus mengadopsi pakaian Barat, perintah tersebut berlaku untuk semua pria dan wanita walau pada awalnya hanya untuk anggota pengadilan dan pejabat pemerintah (“Dress - Government Regulation of Dress | Britannica,” T.t.)

Dari penjelasan di atas dapat dilihat jika suatu pemerintahan dapat mempengaruhi pakaian atau cara berpakaian masyarakatnya dengan berbagai tujuan. Richard Thompson Ford juga berpendapat bahwa mode dan gaya berpakaian tidak hanya dapat digunakan untuk menyampaikan status dan kekuasaan tetapi juga cita-cita dan aspirasi politik baru. Gaya busana dapat digunakan untuk menantang norma-norma dan menawarkan cita-cita politik baru sebagai gantinya. Dari sini dapat dipahami jika ideologi pemerintah dapat mempengaruhi pakaian ataupun cara berpakaian masyarakat dengan tujuan yang beragam (“What Dress Codes Reveal about Politics, Social Change,” 2021). Adapun pada penelitian kali ini peneliti akan berfokus pada ideologi pemerintahan Turki yang dapat mempengaruhi cara berpakaian masyarakat khususnya masyarakat muslim sebagai mayoritas penduduk Turki, seperti yang telah disebutkan sebelumnya jika masyarakat Turki mayoritas beragama Islam dengan prosentase 99.8% dan sisanya 0,2% beragama lain.

Dari latar belakang penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya peneliti menyimpulkan dua rumusan masalah yaitu: (1) bagaimana ideologi pemerintahan Mustafa Kemal

memengaruhi cara berpakaian masyarakat muslim Turki, dan (2) bagaimana ideologi pemerintahan Tayyip Erdogan memengaruhi cara berpakaian masyarakat muslim Turki. Penelitian mengenai ideologi pemerintahan Mustafa Kemal dan Tayyip Erdogan dalam memengaruhi budaya masyarakat Turki juga telah dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya, seperti pada penelitian Sri Mulyati (2014) yang berjudul “*Transformasi Budaya Dari Khilafah Turki Utsmani Menuju Republik Turki Modern (1830-1950)*”. Dalam penelitiannya ia menjelaskan jika transformasi budaya dari masa Khilafah Turki Usmani menuju Republik Turki memiliki banyak perubahan dan salah satunya adalah cara berpakaian (Mulyati, 2014). Penelitian lainnya dari Ahmad Junaidi (2016) yang berjudul “*Kebijakan Politik Recep Tayyip Erdogan dan Islamisasi Turki Kontemporer*”. Dalam penelitiannya ia menyebutkan usaha Erdogan untuk mentransformasi sekulerisme Turki menjadi Islamis, dan kemudian memunculkan perubahan-perubahan salah satunya kebijakan pencabutan larangan berkerudung (Junaidi, 2016).

Pada penelitian kali ini, peneliti akan menggunakan metode sejarah dimana secara garis besar metode sejarah meliputi proses pengumpulan dan pencarian sumber kemudian mengolah data sehingga menemukan fakta. Terdapat empat tahapan dalam melakukan metode sejarah yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi, sedangkan untuk pengumpulan data peneliti menggunakan studi pustaka atau *library research*.

## PEMBAHASAN

### 1. Turki Pada Masa Mustafa Kemal a. Ideologi Pemerintahan Pada Masa Mustafa Kemal

Sejak awal karir Mustafa Kemal merupakan seorang yang revolusioner, adapun prinsip pembaharuannya yaitu nasionalisme, sekulerisme dan westernisme yang kemudian melahirkan ideologi kemalisme. Orang-orang Turki mulai mengenal Mustafa Kemal pada tahun 1913 di Sofia, ketika ia didelegasikan

sebagai atase militer. Keberhasilannya memimpin pasukan militer terlihat ketika ia mampu menahan serbuan kekuatan sekutu Inggris dan juga bagaimana ia berhasil mengamankan kota Istanbul pada perang dunia pertama. Peristiwa-peristiwa tersebut membuat namanya semakin melambung dan ia juga dianugerahi pangkat Jendral dan ditetapkan sebagai Menteri Pertahanan. Kemal merupakan salah satu tokoh pembaharu Turki yang gerah dengan sistem pemerintahan Islami. Sehingga membaca kondisi pemerintahan Turki Utsmani yang semakin carut marut, ia melanjutkan misi pembaharuannya (Junaidi, 2016, hlm. 162–163).

Selanjutnya Mustafa Kemal membentuk sebuah pemerintahan tandingan di Angora (kota itu kemudian berganti nama menjadi Ankara) pada tanggal 23 April 1920, dan diharapkan memiliki kekuatan untuk melawan pemerintahan utama. Kemudian pada tahun 1921, Majelis Nasional Agung mengeluarkan undang-undang baru dengan salah satu pasalnya yang berbunyi bahwa kedaulatan adalah milik rakyat sehingga pada tanggal 1 November 1922 kesultanan dihapuskan (Junaidi, 2016, hlm. 163). Selanjutnya pada tahun 1923 Majelis Nasional Agung akhirnya mengubah bentuk pemerintahan dari bentuk kekhalifahan menjadi republik dengan Mustafa Kemal sebagai presiden pertamanya.

Dihapusnya sistem kekhalifahan menjadi babak baru bagi Turki. Mustafa Kemal sebagai presiden pertama melakukan banyak perubahan, salah satunya yaitu penerapan ideologi sekulerisme untuk merubah ideologi sebelumnya yaitu islamisme. Sekulerisme sendiri merupakan suatu faham atau aliran yang memusatkan perhatian semata-mata kepada masalah duniawi dan dengan sadar berusaha mengasingkan atau menyisihkan peranan agama dari berbagai segi kehidupan manusia. Dari sini dapat dilihat jika Mustafa Kemal berusaha memisahkan antara urusan agama dan urusan politik dalam sistem pemerintahan Turki. Dia sebagai salah satu tokoh pembaharu Turki yang gerah dengan sistem pemerintahan

Islami, berambisi untuk membawa Turki yang lebih maju dan modern. Ali Abd Raziq dalam karyanya *Al Islam Wa Ushul Al Hukm* juga mengkritik terhadap sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh sekelompok umat Islam selama kurang lebih 13 Abad, ia juga mengkritik terhadap teori-teori politik para ulama zaman klasik dan pertengahan. Dalam bukunya ia cenderung berupaya memisahkan antara agama dan politik seperti ia menyoroti fungsi Rasulullah sebagai Nabi dan Kepala Negara (Maryam, 2016, hlm. 106–107).

Dengan adanya perubahan ideologi islamisme menjadi sekulerisme, Mustafa Kemal melakukan reformasi besar-besaran dengan menghilangkan segala macam bentuk yang berhubungan dengan agama dan mulai berkiblat kepada Barat (John, 2002, hlm. 378). Mustafa Kemal menghapus segala pranata dan lambang yang merujuk kepada agama, khususnya agama Islam yang dianggap menghambat modernisasi Turki. Ia mulai merubah dasar hukum, kalender, lafadz adzan, pelarangan penggunaan pakaian sebagai identitas agama, bahkan penghapusan organisasi-organisasi keagamaan, lembaga keagamaan dan lain-lain. Berikut penulis sajikan tabel berisi kebijakan-kebijakan dalam negeri yang dilakukan oleh Mustafa Kemal untuk mendukung ideologi sekulerismenya dan modernisasi Turki (Jacoby, 2004, hlm. 80).

Tabel 1  
 Beberapa kebijakan dalam negeri yang diterapkan pada masa pemerintahan Mustafa Kemal

Tahun	Kebijakan
1924	Penghapusan Seyhul Islam
	Penghapusan Kementerian Urusan Agama
	Penghapusan Pengadilan Syariah
	Penghapusan Sekolah Madrasah
1925	Pelarangan Tariqah (kelompok-kelompok persaudaraan agama)
	Pelarangan Fez atau Kopiah
	Pengadopsian Kalender Gregorian

1926	Pengadopsian Hukum Swiss dalam Perundang-Undangan Sipil
1928	Pengadopsian Numeral (sistem angka) Eropa
	Pengadopsian Aksara Latin
1930	Penghapusan Pasal II Konstitusi (1924) tentang Penetapan Islam sebagai Agama Negara
	Pemberian Hak Pilih Kepada Perempuan dalam Pemilu Kabupaten/Kotamadya
1931	Inisiasi Program Penghilangan Kata-Kata Arab dan Persia dari Bahasa Turki
	Pengadopsian Sistem Metrik
1932	Pelarangan Adzan Memakai Bahasa Arab dan Digantikan dengan Bahasa Turki
1934	Pemberian Hak Pilih Kepada Perempuan dalam Pemilu Kabupaten/Kotamadya Pemilu Nasional
	Pengadopsian Nama Marga
1935	Pengantian Hari Libur dari Jumat ke Minggu

Dari kebijakan-kebijakan di atas dapat dilihat pengaplikasian prinsip-prinsip pembaharuan Mustafa Kemal yaitu nasionalisme, sekulerisme dan westernisme. Adanya pergantian lafadz bahasa Arab menjadi bahasa Turki pada Adzan, pengadopsian Hukum Swiss sebagai Undang-Undang negara, penghapusan agama Islam sebagai agama negara dan lain-lain. Dari kebijakan-kebijakan tersebut membuat banyak perubahan besar pada masyarakat Turki, salah satunya dari segi cara berpakaian. Mereka dilarang menggunakan pakaian sebagai identitas agama, namun diperintah untuk berpenampilan ala Barat dan meninggalkan pakaian yang biasa dikenakan pada masa pemerintahan Turki Utsmani yang bercorak Islami

#### **b. Cara Berpakaian pada Masa Mustafa Kemal**

Pakaian sebagai salah satu hasil dari wujud kebudayaan akan berbeda antara suatu wilayah dengan yang lain. Karena suatu pakaian akan mencerminkan kebudayaan yang ada dalam wilayah tersebut. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya jika suatu pakaian (dan bukan

mode) bisa menjadi sebuah sistem-tanda yang dapat merepresentasikan suatu nilai misalnya nilai sosial, kultural, politik dan bahkan religi di suatu tempat dan suatu masa. Adapun selaras dengan apa yang disampaikan oleh Stillman, dimana nilai-nilai politik dapat terlihat dari suatu pakaian, sehingga pergantian ideologi pemerintahan Turki Utsmani menuju Mustafa Kemal juga membawa perubahan pada berbagai bidang salah satunya yaitu cara berpakaian. Masa kekhalifahan Turki Utsmani yang bercorak Islami, sedangkan masa Mustafa Kemal yang bercorak sekulerisme sehingga memunculkan kebijakan atas cara berpakaian pun berbeda.

Ideologi sekulerisme pemerintahan Turki di bawah pimpinan Mustafa Kemal cenderung berambisi untuk memodernisasikan Turki dengan berkiblat pada Barat. Hal ini memicu munculnya kebijakan-kebijakan yang berlawanan dengan apa yang ada pada masa kekhalifahan Turki Utsmani. Pada tahun 1925 Kemal mengeluarkan peraturan untuk melarang masyarakat laki-laki Turki menggunakan tutup kepala yang disebut *fez* atau topi trubus, sedangkan untuk masyarakat perempuan Turki mereka diperintah untuk tidak mengenakan pakaian muslim, jilbab ataupun cadar (Ismaputaminingsih, 2009, hlm. 144) (Tutur, 2012, hlm. 32). Istri Mustafa Kemal, Latife Ussaki, pun ikut menyuarakan dan mendukung kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh suaminya. Ia melepas kerudung yang selama ini ia kenakan dan menggantinya dengan pakaian ala Barat. Berikut penulis sajikan beberapa potret cara berpakaian masyarakat Turki pada masa Mustafa Kemal:

Gambar 1  
 Mustafa Kemal sedang berbicara dengan warga sipil (1931)



(“Atatürk’s Reforms,” 2022)

Gambar 2  
Feriha Tevlik, Miss Turki pertama (1929)



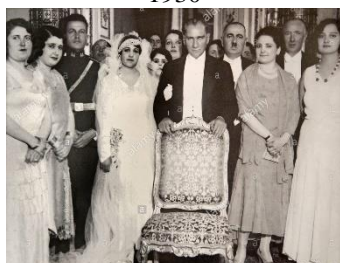
(“Atatürk’s Reforms,” 2022)

Gambar 3  
Upacara pendirian Institusi Sejarah Turki  
pada tahun 1931



(“Atatürk’s Reforms,” 2022)

Gambar 4  
Pernikahan Rukiye Erkin, salah satu putri  
angkat Mustafa Kemal Atatürk, 26 Juni  
1930



(*The wedding of Rukiye Erkin, 1930*)

Adapun dari gambar di atas dapat dilihat jika cara berpakaian masyarakat Turki yang berpakaian ala Barat seperti memakai topi, mantel panjang atau jas sedangkan untuk kaum perempuan mereka tidak memakai penutup kepala, dengan pakaian rendah kerah dada, lengan terbuka dan lain-lain. Cara berpakaian tersebut sangatlah berbeda dengan cara berpakaian masyarakat Turki pada masa Turki Ustmani, berikut peneliti sajikan beberapa potret cata berpakaian masyarakat Turki pada masa Turki Utsmani:

Gambar 5  
Penduduk dari Edirne, salah satu kota di  
Turki (1873)



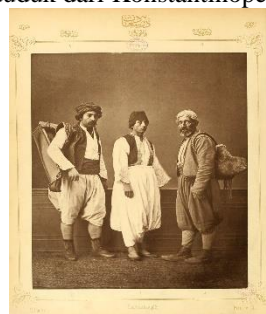
(“Ottoman Clothing,” 2022)

Gambar 6  
Penduduk dari Ankara, salah satu kota di  
Turki (1873)



(“Ottoman Clothing,” 2022)

Gambar 7  
Penduduk dari Konstantinopel 1873



(“Ottoman Clothing,” 2022)

Gambar 8  
Petani Turki (1878)



(“Ottoman Clothing,” 2022)

Adapun dari gambar di atas dapat dilihat perbedaan yang sangat signifikan,

dimana pada masa Turki Usmani kaum laki-laki biasanya mengenakan pakaian luar seperti *mintan* (rompi atau jaket pendek), *zibin*, *salvar* (celana panjang), *kusak* (selempang), *potur* (jubah panjang), *kalpak*, *sarik* (sejenis topi penutup kepala); *carik*, *cizme* (sepatu bot), *cepken*, *yelek* (rompi tanpa kerah). Sedangkan untuk pakaian sehari-hari wanita Turki biasanya mengenakan *salvar* (celana panjang), *gomlek* (kamisol yang turun hingga pertengahan betis atau pergelangan kaki), jaket pendek disebut *zibin*, dan selempang atau ikat pinggang yang diikat di atau tepat di bawah pinggang, penutup rambut dan wajahnya dengan kerudung dan lain-lain (Jirousek, 2005).

Perintah untuk mengikuti cara berpakaian ala Barat disebabkan karena Kemal beranggapan jika bangsa Turki tidak hanya harus berfikir rasional seperti orang-orang barat, tetapi juga meniru tatacara berperilaku dan berpakaian mereka. Berawal dari keinginan tersebut, Mustafa Kemal merealisasikannya dengan menjalankan aturan mengenai cara berpakaian bagi masyarakat Turki melalui undang-undang pada tanggal 3 Desember 1924. Undang-undang tersebut berisikan larangan mengenakan pakaian identitas agama oleh individu yang tidak memiliki kepentingan dan mewajibkan semua pegawai pemerintahan untuk memakai pakaian dengan setelan gaya barat. Dengan adanya peraturan ini Mustafa Kemal beranggapan akan mempermudah masyarakat Turki dalam melakukan urusan-urusan bisnis dengan perusahaan asing. Terutama perusahaan dari negara-negara Barat, dengan penggunaan pakaian yang sama dengan stelan orang Barat membuat para pembisnis Barat merasa nyaman dan percaya untuk melakukan kerjasama dengan pembisnis Turki. Hal ini kemudian akan mengangkat ekonomi masyarakat Turki (B. Toprak, 1999, hlm. 84–85).

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan, jika ideologi pemerintahan Mustafa Kemal yang sekuler berpengaruh pada cara berpakaian masyarakat Turki. Cara berpakaian yang awalnya bercorak Islami berubah menjadi

kebarat-baratan karena ambisinya yang ingin memodernkan bangsa Turki.

## 2. Turki Pada Masa Recep Tayyip Erdogan

### a. Ideologi Pemerintahan Pada Masa Recep Tayyip Erdogan

Recep Tayyip Erdogan adalah seorang legislator, ia pernah terpilih menjadi Perdana Menteri pada pemilihan umum 2002, 2007 dan 2011. Ia merupakan presiden pertama Turki yang dipilih langsung melalui keputusan pemilihan umum 2014. Berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya yang kebanyakan menganut kemalisme, Erdogan lebih dikenal dengan identitas politik islaminya yang kuat. Identitas politik Islamnya didapat tidak lain dari Necmettin Erbakan, yang dianggap sebagai guru Erdogan dalam masalah legislatif. Ia merupakan individu yang memiliki filosofi perjuangan Islamisme, di mana ia berkeinginan membangun kembali kepribadian negara Islam Turki dari pembatasan sekularisme Mustafa Kemal (Junaidi, 2016, hlm. 170).

Berbeda dengan Mustafa Kemal yang menuhankan Barat sebagai kiblat Turki, Erdogan melakukan hal yang sebaliknya yaitu berupaya memutus dominasi Barat dan berupaya menjadikan Turki sebagai pemimpin negara-negara Islam dalam memperjuangkan Islam di dunia Internasional. Hal-hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kebijakan luar negeri Erdogan, dimana Turki lebih merapat kepada negara-negara Timur Tengah (Arab), terutama dengan negara-negara Islam contohnya ketika Turki menolak menjadikan wilayahnya sebagai pangkalan militer NATO untuk melakukan invasi ke Libya dan menolak permintaan Amerika Serikat untuk menjadikan wilayahnya sebagai pangkalan militer dalam agenda invasi ke Irak (Junaidi, 2016, hlm. 171).

Adapun dengan kebijakan-kebijakan Erdogan yang bertentangan dengan kemalisme membuat para lawan politiknya menyebut ini sebagai fenomena “Neo-Ottomanisme”. Paham Neo-Ottomanisme sendiri pertama kali digagas oleh Prof Ahmed Davutoglu yang merupakan ketua

penasihat Erdogan untuk urusan kebijakan luar negeri. Neo-Ottomanisme merupakan visi kenegaraan dan politik baru Turki yang menekankan kekuatan peran politik Turki, baik pada tingkat regional maupun global melalui kekuatan diplomatik. Davutoglu merupakan salah satu tokoh yang paling vokal menyuarakan Neo-Ottomanisme dan menekankan pentingnya warisan Ottomanisme sebagai pemikiran besar yang perlu diperhatikan oleh para pengambil kebijakan di Turki (Arianto, 2019, hlm. 94). Dinyatakan bahwa Neo-Ottomanisme memiliki tiga rumusan utama, yaitu (1) kembalinya Turki dengan identitas Islamnya dan akar Ottoman sebelumnya. (2) Menjaga perasaan tentang pentingnya Utsmaniyah dan memiliki keyakinan ketika mengarahkan strategi internasional seperti halnya menghilangkan perasaan rendah diri di hadapan berbagai negara. (3) Selalu terbuka terhadap hubungan dengan Barat, begitu juga menjaga hubungan dengan Timur Tengah (Yansah, 2018, hlm. 7).

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan jika pemerintahan Erdogan ingin membangun ideologi sekulerisme yang lebih moderat dan juga lebih dekat dengan budaya Islam. Dengan ideologi yang berbeda dengan masa Mustafa Kemal membuatnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berbeda pula, salah satunya dalam cara berpakaian. Ia mencabut larangan pemakaian jilbab, karena larangan berjilbab dianggap melanggar hak asasi manusia khususnya bagi masyarakat muslim Turki yang kemudian berdampak pada berbagai bidang seperti bidang sosial, pendidikan dan ekonomi. Kebijakan mengenai larangan mengenakan jilbab sering kali mendapat aksi protes baik dari kelompok organisasi, LSM, elit politik dan masyarakat individu (Ratna, 2017, hlm. 27)

#### **b. Cara Berpakaian Masyarakat Turki pada Masa Erdogan**

Perbedaan ideologi pemerintahan pada masa Mustafa Kemal dan Erdogan sangat berpengaruh pada cara berpakaian masyarakat Turki. Pada masa Mustafa

Kemal yang bercorak sekulerisme sehingga masyarakat Turki diperintahkan untuk meninggalkan pakaian sebagai identitas agama seperti jilbab, cadar, *fez* dan mereka dianjurkan untuk memakai pakaian ala Barat. Hal itu untuk mendukung program modernisasi Turki. Pelarangan pemakaian kerudung bagi perempuan Turki diterapkan baik pada lembaga-lembaga negara, lembaga pendidikan, kepolisian dan sebagainya. Kemudian hadirnya Erdogan berusaha untuk mentransformasi ideologi sekulerisme yang telah mendarahdaging pada masyarakat Turki dengan sekulerisme yang lebih moderat dan mendekati pada budaya Islam seperti yang ada pada kekhalifahan Turki Utsmani. Dengan cita-cita Erdogan ini, ia berusaha membuat kebijakan-kebijakan seperti pencabutan larangan berjilbab dan juga pembebasan untuk menggunakan pakaian muslim ataupun bagi laki-laki.

Pencabutan larangan berjilbab dilakukan secara bertahap, menimbang karena paham kemalisme yang masih mendarahdaging sehingga masih sangat sulit untuk merealisasikannya secara langsung. Pencabutan larangan berjilbab dilakukan pertama kali pada lembaga pendidikan dan lembaga pegawai negara pada tahun 2013, setelah mengalami penolakan pada tahun 2010. Dua tahun kemudian yaitu tahun 2015 pencabutan larangan berjilbab kembali dikeluarkan khususnya bagi para pegawai pengadilan. Kemudian pada tahun 2016 dikeluarkan bagi para anggota kepolisian dan tahun 2017 dikeluarkan bagi para anggota kemiliteran (M. Toprak & Uslu, 2009). Setelah pencabutan Erdogan pada beberapa kebijakan mengenai tata cara berbusana pada masa Mustafa Kemal, masyarakat Turki kini bisa menggunakan jilbab dengan bebas baik di sekolah-sekolah, di lembaga kenegaraan, kepolisian, pengadilan dan juga penggunaan topi *fez*, semua kebijakan ini disambut baik oleh beberapa masyarakat Turki.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan jika cara berpakaian masyarakat Turki pada masa Erdogan dipengaruhi oleh ideologinya yang lebih



pada sekuler moderat dan lebih dekat pada budaya Islam sehingga memunculkan kebijakan diperbolehkannya memakai jilbab, cadar, dan pakaian muslim atau identitas agama lainnya.

## KESIMPULAN

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan jika ideologi pemerintahan Turki berpengaruh pada cara berpakaian masyarakat muslim Turki khususnya pada masa pemerintahan Mustafa Kemal dan Erdogan. Seperti diketahui jika suatu pakaian (dan bukan fashion) bisa menjadi sebuah sistem-tanda yang dapat menggambarkan beberapa nilai seperti nilai kultural, politik, sosial, dan bahkan religi di suatu tempat dan suatu masa. Pada masa pemerinatahan Mustafa Kemal yang merupakan tokoh revolusioner dengan corak sekulerisme, nasionalisme dan westernisme, ia sangat berambisi untuk memodernkan Turki dengan berkiblat pada Barat dan meninggalkan identitas-identitas keagamaan. Keinginan Mustafa Kemal untuk berkiblat pada barat membuatnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti pelarangan penggunaan fez bagi kaum laki-laki dan larangan penggunaan kerudung, cadar atau penutup kepala lainnya bagi kaum perempuan. Mustafa Kemal memerintahkan masyarakat Turki untuk berpakaian ala Barat, karena ia beranggapan jika bangsa Turki harus mengikuti mulai dari cara berfikir rasional hingga meniru gaya berpakaian ataupun fashion orang-orang Barat. Karena dengan cara berfikir atau berpakaian seperti mereka, Musatafa Kemal berharap akan memudahkan Turki dalam melakukan urusan-urusan bisnis dengan perusahaan asing, terutama dari negara-negara Barat.

Adapun pada masa pemerintahan Erdogan yang berusaha untuk mengubah ideologi sekulerisme pada masyarakat Turki dengan sekulerisme yang lebih moderat dan mendekatkan pada budaya Islam. Sehingga ia berusaha mencabut kebijakan-kebijakan Mustafa Kemal yang dirasa menjauhkan dari budaya Islam. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Erdogan seperti pembebasan pada masyarakat Turki untuk mengenakan

pakaian muslim dan pencabutan larangan jilbab. Sehingga pada masa Erdogan kaum perempuan Turki telah bebas menggunakan jilbab atau penutup kepala lainnya baik pada lembaga pendidikan, kepegawaian negara, kesehatan, pengadilan, kepolisian dan lain-lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, M. T. (2019). *Peran Recep Tayyib Erdogan Dalam Membangun Sektor Ekonomi Politik Di Negara Turki*. Universitas Sumatera Utara. Diambil dari <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/32758>
- Atatürk's reforms. (2022). Dalam *Wikipedia*. Diambil dari [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Atat%C3%BCrk%27s\\_reforms&oldid=1087406683](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Atat%C3%BCrk%27s_reforms&oldid=1087406683)
- Dress—Government regulation of dress | Britannica. (T.t). Diambil 6 Juni 2022, dari <https://www.britannica.com/topic/dress-clothing/Government-regulation-of-dress>
- Ismaputaminingsih. (2009). *Negara Turki Modern ala Mustafa Kemal Atatürk*. Bandung: Iris Press. Bandung: Iris Press.
- Jacoby, T. (2004). *Social Power and the Turkish State*. London and New York: Frank Cass.
- Jirousek, C. (2005). *Ottoman Influences in Western Dress, Ottoman Costumes: From Textile to Identity*. S. Faroqhi and C. Neumann. Istanbul: Eren Publishing. Diambil dari <http://char.txa.cornell.edu/influences.htm>
- John, F. (2002). *Istanbul Kota Kekaisaran*. Penerj. Fahmy Yamani. Jakarta: Pustaka Alfabet.
- Junaidi, A. (2016). Kebijakan Politik Recep Tayyib Erdogan dan Islamisme Turki Kontemporer. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol.r, No. 1*. Diambil dari <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1444>

- Macridis, R. C. (1983). *Contemporary Political Ideologies: Movements and regimes*. Boston: Little, Brown and Company.
- Maftuhin, A. (2011). Menyingkap Struktur Makna Pakaian Arab. *Jurnal Musawa, Vol. 10, No. 1*. Diambil dari <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/101-08>
- Maryam. (2016). SISTEM POLITIK ISLAM DAN SEKULER (Maududi Dan Ali Abd Al-Rizq). *Jurnal El Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir, Vol. 5, No. 1*. Diambil dari <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/view/1126>
- Mulyati, S. (2014). Transformasi Budaya Dari Khilafah Turki Utsmani Menuju Republik Turki Modern (1830-1950). *Jurnal CMES: Jurnal Studi Timur Tengah, Vol. 7, No 1*. Diambil dari <https://jurnal.uns.ac.id/cmest/article/view/15326>
- Nuzulian, U. (2008). *Kebijakan Pemerintah Turki Terhadap Etnis Kurdi*. Universitas Indonesia. Diambil dari <https://lib.ui.ac.id/detail?id=117140&lokasi=lokal>
- Ottoman clothing. (2022). Dalam *Wikipedia*. Diambil dari [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ottoman\\_clothing&oldid=1085797442](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ottoman_clothing&oldid=1085797442)
- Ratna, I. W. (2017). *Kebijakan Pemerintah Turki Mencabut Undang-Undang Larangan Hijab Tahun 2013*. Repository Universitas Jember. Diambil dari <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/83232>
- The wedding of Rukiye Erkin, one of adopted daughters Mustafa Kemal Atatürk, 26 June 1930*. (1930). Milliyet. Diambil dari [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The\\_wedding\\_of\\_Rukiye\\_Erkin.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_wedding_of_Rukiye_Erkin.jpg)
- Toprak, B. (1999). *Islam dan Perkembangan Politik di Turki*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Toprak, M., & Uslu, N. (2009). The Headscarf Controversy in Turkey. *Journal of Economic and Social Research, Vol.1, No. 1*. Diambil dari [https://www.researchgate.net/publication/46446719\\_The\\_Headscarf\\_Controversy\\_in\\_Turkey](https://www.researchgate.net/publication/46446719_The_Headscarf_Controversy_in_Turkey)
- Turkey. (2022). Dalam *The World Factbook*. Central Intelligence Agency. Diambil dari <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/turkey/>
- Tutur, F. (2012). *Reformasi Kebudayaan Di Republik Turki (1923-1950)*. Universitas Indonesia. Diambil dari <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20303738-S1941-Tutur%20Furqon.pdf>
- What dress codes reveal about politics, social change. (2021, Februari 10). Diambil 6 Juni 2022, dari Stanford News website: <https://news.stanford.edu/2021/02/10/dress-codes-reveal-politics-social-change/>
- Yansah, S. (2018). Pemikiran Politik Recep Tayyip Erdogan dan Perkembangannya di Turki. *Jurnal Manthiq, Vol. 3, No. 1*. Diambil dari <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manthiq/article/view/1897>